

Judul:

Arguing for Human Equality

Link:

[Arguing for Human Equality by Patrick McKinley Brennan.pdf - Google Drive](#)[Links to an external site.](#)

Penulis: Patrick McKinley Brennan

Artikel ini secara garis besar menjelaskan tentang apa yang membuat manusia itu setara dan apakah manusia itu adalah setara atau tidak. Penggambaran yang ia tuliskan banyak mengambil banyak teori-teori yang telah dipaparkan oleh beberapa filsuf, tokoh agama, dan tokoh terkait untuk mengambil kesimpulannya. Contohnya saja seperti Abraham Lincoln, James Boyd White, Joseph Vining, Ronald Dworkin, Immanuel Kant, John Courtney Murray, Friedrich Nietzsche, George Kateb, Thomas Aquinas dan lain-lain. Selain dari tokoh-tokoh tersebut ia juga menjelaskan dari berbagai perspektif Egalitarianisme dan Teologi.

Dalam artikel ini ia lebih banyak menjelaskan tanggapan-tanggapan atau argumen-argumen tentang kesetaraan. Bahkan untuk pemahaman kesetaraan Immanuel Kant sendiri cukup banyak ia menjelaskan dalam artikelnya ini. Kant yang beranggapan bahwa kesetaraan manusia timbul dari hasil pemikiran manusia itu sendiri, yaitu dari sikap keadilan dan kebebasan manusia sehingga menciptakan suatu pemikiran yang rasional dan membentuk moralitas untuk membangun hubungan antar manusia yang belum memiliki daya pikir yang rasional ataupun yang beramoral. Ia sangat tertarik dengan pemahaman ini, karena ini adalah seperti awal dari teori baru yang dibentuk oleh orang pada masa itu yang mana sebelum-sebelumnya tentang kesetaraan manusia banyak berkiblat ke arah teori "Ketuhanan". Dan selanjutnya Patrick juga menjelaskan teori kesetaraan manusia yang berjalan dalam agama yang dianut oleh *Christians* yaitu teologi

Teori kesetaraan manusia juga dipercaya oleh *Christians*/pengikut Kristus. Yang mana alasan para pengikut ini beranggapan bahwa manusia adalah setara yaitu ketika "Tuhan" mereka yang rela berkorban demi keselamatan umat manusia di seluruh muka bumi. Para pengikut ini percaya bahwa "Tuhan" mereka berkorban bukan hanya untuk mereka diri sendiri yaitu hanya untuk pengikutnya saja, melainkan penebusan dosa yang dilakukan oleh "Tuhan" mereka tersebut juga dilakukan untuk orang-orang yang tidak percaya/*non-Christians*. Artinya "Tuhan" mereka menganggap bahwa manusia, yaitu kita memiliki kondisi yang setara. Percaya atau tidak adalah kembali pada diri masing-masing namun pengorbanan itu telah ada dalam sejarah.

Jika pengorbanan tersebut tidak ada, maka para *Christians* tidak memiliki data kuat bahwa manusia adalah setara. Hal ini tentang kesetaraan manusia ini telah dikonfirmasi oleh St. Paul dan secara eksplisit dijelaskan oleh Thomas Aquinas. Patrick disini bukan untuk membela agama tertentu melainkan untuk menunjukkan bahwa kita tidak bisa hidup sampai saat ini jika bukan karna hal tersebut yang mana adalah kesetaraan. Tapi, menurutnya jika kita tidak bisa kembali ke agama, maka kita juga harus meninggalkan egalitarianisme dan merancang filosofi politik yang mencerminkan asumsi naturalistik, teori yang terus memandang manusia sebagai hewan dengan bakat berbeda yang harus bergaul.

Dari itu semua Patrick McKinley menyimpulkan kesetaraan atau *equality* pada manusia adalah benar adanya. Meski kita sampai saat ini masih bertanya-tanya apa faktor atau apa indikasi bahwa manusia dapat dikatakan setara, hal tersebut hanya dapat kita jawab dari diri kita masing-masing. Sembari kita mencari jawaban tersebut kita harus tetap menjaga kesetaraan diantara manusia daripada kita terus menerus berdebat dengan isu kesetaraan manusia ini.

Artikel ini menurut kami/*reviewer* sudah runut dijelaskan dengan baik hanya saja ada beberapa kekurangan. Argumen apa saja yang dapat diambil oleh Patrick yang tentu saja relevan dengan tesis ini. Tidak secara sembarangan beliau mengambil beberapa perspektif orang ataupun pemahaman tertentu untuk mengambil kesimpulan dari pandangannya. Argumen-argumen yang la ambil memiliki data yang kuat serta dibelakangi oleh siapa yang la masukkan ke dalam artikelnya. Meskipun dalam artikel ini kita tidak mendapat jawaban yang pasti tentang faktor kesetaraan manusia atau *humans equality* namun dengan adanya artikel ini kita bisa memahami kenapa kita harus tetap memiliki prinsip untuk menjaga kesetaraan tersebut untuk bisa hidup di bumi ini. Dan juga sebaiknya la menambahkan bukti atau kasus nyata terkait kesetaraan manusia yang la lihat atau alami bukan dari pandangan orang lain saja. Ada banyak opini yang diutarakan oleh penulis, tetapi kurang kasus nyata yang terkait opini yang diutarakan, padahal penambahan kasus nyata akan mampu memperkuat opini yang diberikan. Artikel ini membahas kesetaraan manusia dalam 53 halaman, sehingga ada banyak kalimat yang dibahas berulang-ulang terkait kesetaraan manusia. Sehingga pembahasannya seperti berbelit-belit.

Judul:

Inequality in Modern Societies: Causes, Consequences and Challenges

Link:

[Jurnal Inequality - Google Drive](#)[Links to an external site.](#)

Penulis: Amanda Machin and Nico Stehr

Tesis dalam artikel ini

Masih menjadi perdebatan apakah ketidaksetaraan itu alami secara biologis tanpa adanya campur tangan tindakan manusia dan tatanan sosial. Ketidaksetaraan menjadi topik yang tiada hentinya untuk dibahas dalam ilmu sosial. Perbedaan secara alami yang tidak dapat dihilangkan dan perbedaan yang dapat disesuaikan secara sosial menjadi isu menarik dalam bidang ilmu sosial dan kedokteran. Ketidaksetaraan semakin sering disinggung dalam berbagai bidang studi penelitian (sosial, ekonomi, politik, dan biologi). Tesis yang dibahas dalam artikel ini adalah : **“Pola ketimpangan menjadi lebih kompleks karena batas antara ketimpangan sosial dan alamiah semakin kabur”**

Argumen dalam artikel ini

Pada artikel ini argumen dibuka dengan mengangkat bahwa ketidaksetaraan bersifat alami. Jika ketidaksetaraan berakar pada fakta biologis yang tidak dapat diubah, maka dapat dikatakan bahwa hierarki sosial tidak mencerminkan apapun kecuali tatanan alam. Richard Herrnstein dan Charles Murray (1994) berpendapat bahwa

ketidaksetaraan sosial utama di Amerika Serikat di antara kelompok etnis bergantung pada perbedaan kecerdasan. Mereka yakin bahwa kecerdasan bawaan adalah penentu utama kesuksesan sosial dan ekonomi. Mereka menyimpulkan bahwa upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan dengan tindakan manusia telah menyebabkan bencana. Kesimpulan ini tentu menjadi perdebatan. Jika ketimpangan sosial bersifat alami, penelitian ketimpangan sosial akan menjadi usang dan tuntutan politik untuk mengubah tatanan sosial akan menjadi sia-sia.

Menurut Rousseau ketimpangan muncul sebagai akibat dari munculnya kepemilikan pribadi sedangkan menurut Pierre Bourdieu, bahwa pencapaian skolastik anak yang tidak setara dalam aspek sosial menunjukkan hasil yang berbeda karena berkaitan dengan peluang yang diperoleh tiap kelas sosial tidak setara. Ketidaksetaraan muncul karena adanya fungsi sosial yang diperankan oleh seseorang.

Ketidaksetaraan terkenal sulit diukur. Namun seiring dengan peningkatan yang pesat dalam ketimpangan, pembuktian dilakukan dengan penelitian empiris. Berbagai penelitian yang berdasarkan data dan diolah secara statistik semakin banyak ditemukan.

Ketidaksetaraan ini memunculkan beberapa konsekuensi dari segi sosial dan politik. Ketimpangan sosial tidak hanya memupuk potensi kejahatan tertentu, tetapi juga menghasilkan tingkat keparahan hukuman yang tidak setara dengan kejahatan tersebut. Penelitian terkait korelasi ras dengan ketidaksetaraan dalam sistem penjara Amerika Serikat. “Laki-laki Afrika-Amerika 6 kali lebih mungkin dipenjara daripada laki-laki kulit putih”. Penelitian ini semakin menegaskan bahwa bukan perbedaan alami yang mendukung ketidaksetaraan sosial, melainkan ketidaksetaraan sosial mendukung perbedaan rasial yang alami dan berkontribusi pada konstruksi kategori ras itu sendiri. Pendapat lain mengatakan bahwa pengetahuan dan keterampilan pengetahuan memainkan peran penting dalam membentuk sifat dan struktur sosial dalam kesetaraan

masyarakat modern. Selain itu, ketidaksetaraan juga dipengaruhi oleh masalah global seperti perubahan iklim yang mempertinggi ketimpangan yang ada.

Pola ketidaksetaraan saat ini menjadi lebih kompleks karena batas antara ketimpangan sosial dan alamiah semakin kabur. Perkembangan ilmiah terkait genetika dan rekayasannya menjadi masalah yang semakin membiaskan pola ketidaksetaraan. Masih menjadi pertanyaan apakah tubuh kita, gen kita, dan kesehatan kita adalah fakta di luar batas pengaruh sosial karena hal tersebut termasuk dalam ketidaksetaraan alam atau dapatkah ekonomi, pengetahuan sosial, dan pemerindah mengubah apa yang secara alami tidak setara menjadi masalah ketidaksetaraan sosial. Kemampuan setiap manusia tentu saja tidak berdistribusi secara merata. Beberapa individu dan kelompok di beberapa wilayah mungkin mendapatkan pilihan-pilihan yang berbeda.

Ketidaksetaraan ras, etnis, gender, dan jenis kelamin terkait erat dengan pengetahuan ilmiah. Namun, hal ini dapat dibantahkan bahwa sebenarnya mereka sepenuhnya dibangun secara sosial. Misalnya gender. Pelabelan laki-laki dan perempuan merupakan keputusan sosial. Pengetahuan ilmiah digunakan untuk membantu membuat keputusan, tetapi hanya dengan keyakinan tentang gender (bukan sains) yang dapat menentukan jenis kelamin kita. Ketidaksetaraan tidak mungkin hanya diperburuk atau dikurangi. Justru sebaliknya, keragaman bentuk ketimpangan sosial akan terjalin bersama dengan ketimpangan baru yang kompleks.

Evaluasi artikel dan alasan evaluasi

Dalam artikel ini sebenarnya dapat dikatakan sudah baik dan cukup lengkap karena disertakan dengan pemikiran-pemikiran dari para ahli, berdasar dan bersumber dari penelitian-penelitian terdahulu yang dapat menguatkan argumentasi. Pembuktian secara empiris terkait ketidaksetaraan masih kurang kuat sehingga dalam penulisan artikel ini dapat lebih diperbanyak mengutip penelitian secara empiris atau mengutip penelitian empiris yang menghasilkan suatu kesimpulan yang kuat.

Data yang disediakan dalam jurnal ini pun baik, dikarenakan mendukung pernyataan yang sudah dikemukakan oleh para ahli.

Sebagian besar jurnal ini berisikan prediksi dimasa depan tentang perubahan sosial yang dapat mendukung transformasi ketidaksetaraan sosial, sehingga isinya adalah pola pola ketimpangan sosial yang akan terjadi. Penjelasan mengenai batas antara ketimpangan sosial dan alamiah semakin kabur pun sangat sedikit dijelaskan, jadi tidak secara terang dijelaskan mengenai batas yang kabur tentang ketimpangan sosial.

Judul:

Inequality in nature and society

Link Sumber Artikel:

https://drive.google.com/file/d/1hE3cgsR4QZ84IAXHwWajzqLtl-IINISA/view?usp=share_linkLinks to an external site.

Penulis: Marten Scheffera, Bas van Bavelb, Ingrid A. van de Leemputa, and Egbert H. van Nesa

Tesis:

Ada persamaan antara pola ketidaksetaraan di alam dan di masyarakat

Argumen:

1. Di masyarakat, sebagian besar masyarakat secara ekonomi didominasi oleh elit-elit kecil. Menurut penulis, hal tersebut ditunjukkan bahwa 1% dari populasi memiliki 50% dari total kekayaan di tingkat global. Sedangkan yang terjadi di alam, contohnya di hutan Amazon, 1% dari spesies pohon menyumbang 50% dari total karbon. Ini didasarkan pada pemodelan yang membandingkan distribusi kekayaan individu terkaya di dunia dengan distribusi kelimpahan spesies pohon di hutan Amazon.
2. Menganggap bahwa ketidaksetaraan terjadi karena kebetulan. Kemudian ketidaksetaraan akan meningkat dengan cepat karena ada aktor yang mengambilalih dan memainkan permainan. Sebagai contoh, serangkaian sifat tertentu pada spesies (termasuk manusia) memberi beberapa spesies keunggulan kompetitif dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian para aktor menggunakan keunggulan-keunggulan tersebut untuk mendominasi dirinya.
3. Terdapat dua hal yang bisa meredakan ketidaksetaraan, yaitu penekanan pada dominasi atau mengangkat mayoritas hingga mendekati titik enol. Maksudnya misalkan di suatu daerah ada sebuah dominasi, maka dominasi tersebut bisa diredakan, untuk mengurangi ketidaksetaraan. Selain itu misalkan di suatu daerah lebih banyak orang kaya, maka bisa dilakukan pemindahan orang yang kaya tersebut ke tempat lain, sehingga orang kaya bukan lagi sebuah mayoritas yang bisa sangat jelas terlihat.
4. Institusi pemerintah berperan penting dalam menghadapi ketimpangan, pemerintah bisa menempatkan sebagai peran dominan untuk membentuk kesejahteraan.

Kelebihan:

1. Terdapat batasan yang jelas dari ketidaksetaraan yang terjadi di masyarakat, yaitu hanya pada kekayaan rumah tangga
2. Disebutkan secara jelas faktor pembentuk ketidaksetaraan

Kekurangan:

1. Analisis bahwa ada persamaan antara pola ketidaksetaraan di alam dan di masyarakat hanya dilakukan pada tingkat abstrak, sehingga kemungkinan jika dilihat secara rinci dan kompleks, mekanisme yang mengatur distribusi kekayaan dalam masyarakat jelas sangat berbeda dengan proses yang mengatur kelimpahan spesies di alam
2. Tidak terlalu menjelaskan tesis di awal yakni bahwa terdapat persamaan antara pola ketidaksetaraan di alam dan di masyarakat. Sehingga kurang dapat dipahami.
3. Bahasa yang digunakan cukup sulit dipahami oleh orang awam.

Judul:

Natural Equality and Natural Law in Locke's Two Treatises

Link:

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/339515/Natural_Equality_and_Natural_Law_in_Locke.2021.pdf;jsessionid=C7772C0DF1E328C4140B1D8B12ABD181?sequence=1
[Links to an external site.](#)

Penulis: Kari Saastamoinen

Tesis:

Gagasan bahwa manusia pada dasarnya setara adalah topik standar dalam komentar modern. Gagasan Locke tentang kebebasan dan kesetaraan alami dilihat sebagai tanda komitmennya terhadap nilai-nilai otonomi individu dan kesetaraan politik yang dipegang teguh dalam masyarakat liberal-demokratis saat ini, dan teori politiknya dibaca sebagai upaya yang kurang lebih berhasil untuk mengartikulasikan nilai-nilai tersebut. Dalam artikel ini, penulis mengangkat tesis yaitu "Pendekatan terhadap pernyataan Locke tentang kesetaraan alam semacam itu secara historis menyesatkan dan pernyataan Locke paling baik dipahami ketika kita menganggap serius fakta bahwa Locke mengembangkan teori politiknya dalam parameter hukum alam abad ke-17".

Argumen:

- Dalam *Two Treatises* Locke menggunakan gagasan kesetaraan alam untuk menunjukkan versinya sendiri tentang pandangan bahwa tidak ada orang yang memiliki otoritas politik bawaan atas orang lain. Gagasan tentang persamaan alam dan kebebasan alam bukanlah hal baru ketika Locke menulis *Two Treatises*. Pada zaman kuno sudah ada gagasan yang mengartikulasikan dengan lokus klasiknya adalah *Corpus iuris civilis*, di mana Ulpian menyatakan menurut hukum kodrat manusia bebas dan setara, karenanya perbudakan bertentangan dengan hukum kodrat.

- Sementara karakter kesetaraan dan kebebasan alami bervariasi dari penulis ke penulis, dan konsep-konsep ini digunakan untuk berbagai tujuan, mereka merujuk terutama pada gagasan bahwa tidak ada individu yang pada dasarnya adalah pelayan orang lain. Sampai paruh pertama abad ke-17, kesetaraan dan kebebasan alami paling sering dilihat sebagai gagasan yang membantu kita memahami karakter yang tepat dari hubungan kekuasaan manusia, dan tidak dipahami sebagai subversif sehubungan dengan hierarki sosial yang berlaku.
- Dalam Risalah pertama, Locke mengaitkan kesetaraan alam dengan gagasan bahwa 'setiap orang harus mengambil bagian dalam Hak dan Hak Istimewa yang sama'. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa Locke menyajikan karakterisasi kesetaraan alam ini di tengah argumennya untuk pandangan 'Manusia memiliki Kebebasan Alamiah' dalam arti hanya 'persetujuan manusia sendiri yang membuatnya tunduk pada Superior'. Dalam argumen eksplisitnya adalah kesetaraan kodrat ditujukan untuk menunjukkan bahwa tidak seorang pun pada dasarnya memiliki kekuatan politik atas orang lain.
- Locke menyatakan keadaan alam adalah kondisi kesetaraan dalam arti tidak hanya semua 'Yurisdiksi' tetapi juga 'semua Kekuasaan' bersifat timbal balik, 'tidak ada yang memiliki lebih dari yang lain'. Keadaan alami yang menyatakan 'semua kekuatan' adalah timbal balik dapat dipahami berarti setiap jenis otoritas, tidak hanya kekuatan politik, perlu didasarkan pada persetujuan, terutama karena dia kemudian mencirikan keadaan alam sebagai kondisi 'Kesetaraan sempurna'.
- Dalam Risalah kedua, Locke menjelaskan bahwa karena anak kecil tidak mampu mengetahui dan mematuhi hukum pelestarian, mereka harus hidup di bawah otoritas kuasi-yuridis orang tua mereka. Penting untuk dicatat bahwa bukan kurangnya alasan saja yang membuat anak tunduk pada otoritas orang tua mereka. Yang penting adalah karena kemampuan rasional mereka yang tidak memadai, anak-anak tidak mampu menjaga diri mereka sendiri.
- Pada paragraf II. 6, Locke menjelaskan mengapa keadaan alam bukanlah keadaan lisensi, ia menyatakan kembali bahwa itu diatur oleh hukum alam, menambahkan sekarang bahwa 'Akal, yaitu Hukum itu, mengajarkan semua umat manusia, yang akan berkonsultasi dengannya, bahwa menjadi segalanya setara dan mandiri, tidak seorang pun boleh menyakiti orang lain dalam kehidupan, kesehatan, kebebasan, atau harta miliknya. Dengan ini Locke tidak mengatakan kewajiban untuk tidak menyakiti orang lain akan didasarkan pada kebebasan dan kesetaraan alami.
- Pengamatan penting adalah bahwa gagasan manusia sebagai bebas dan setara secara alami dibagikan secara luas di Eropa modern awal, dan bahwa gagasan ini biasanya mengacu pada gagasan bahwa hukum alam tidak memberikan kekuatan politik individu atas yang lain.
- Kebebasan alami dan kesetaraan untuk membenarkan pandangan bahwa rakyat memiliki hak untuk memilih segala bentuk pemerintahan yang mereka inginkan dan bahkan hak untuk menghukum raja, jika dia melanggar hukum monarki.

- Tidak seorang pun berkewajiban untuk mematuhi orang lain dalam hal-hal yang penting untuk dilestarikan, dan tidak ada yang berhak memaksakan kehendaknya pada orang lain dengan menggunakan ancaman hukuman.
- Dalam teori Locke, manusia pada dasarnya setara karena mereka semua secara pribadi bertanggung jawab kepada Tuhan karena memelihara kehidupan mereka sendiri, karenanya tidak seorang pun pada dasarnya memiliki hak untuk menjatuhkan hukum kepada orang lain yang disetujui oleh hukuman.
- Setiap orang memiliki hak untuk mematuhi hukum pelestarian secara independen dari orang lain, tidak ada yang memiliki kekuasaan legislatif atas yang lain, dan semua berhak untuk menghukum pelanggaran hukum alam.

Evaluasi:

Secara umum, penulis sudah mampu menjelaskan secara detail terkait tesis dan argumen yang diangkat dalam artikel ini. Penulis membedah satu-persatu mengenai gagasan Locke dalam *Two Treatises* dan mengelaborasikannya dengan baik. Penulis juga menunjukkan pandangan-pandangan filsuf lain yang bertentangan dengan gagasan Locke dan penulis mampu menunjukkan pembantahan atas hal itu berdasarkan batasan yang ada dalam gagasan Locke. Namun, ada hal yang perlu dijadikan bahan evaluasi, yaitu penjelasan yang ditulis tidak langsung menuju poin yang ingin di bahas dan juga pembahasan susah dipahami bagi orang awam sehingga pembaca perlu membaca berkali-kali agar paham dengan konteks yang dimaksud oleh penulis. Selain itu, karena dokumen yang berhasil kami didapatkan adalah dokumen versi *reprint* maka terdapat beberapa koreksi mengenai format penulisan sebagai berikut.

- Terdapat format penulisan yang salah.
- Tidak ada nomor halaman sehingga pembaca kesusahan untuk merefer sesuatu pada artikel tersebut.
- Terdapat paragraf yang terpisah dengan halaman kosong.

Judul:

Autonomy as Natural Equality: Inequality in 'Egalitarian' Societies

Link:

https://drive.google.com/file/d/1oD2R7gAxoVis0n0XfxFQf8IEZ4X0-r_e/view?usp=drivesdkLinks to an external site.

Penulis: Christine Halliwell

#Tesis

Artikel ini menentang adanya keterkaitan antara gagasan “otonomi” dan “kesetaraan” yang ditemukan dalam banyak diskusi antropologis mengenai grup “egaliter”. Argumen dalam artikel ini dibawakan dengan merujuk pada satu contoh peradaban “egaliter” Suku Dayak di Kalimantan, Suku Gerai. Dalam peradaban ini, sebuah ideal yang bisa diterjemahkan sebagai “otonomi” dikaitkan dalam suatu sistem peringkat dalam sebuah komunitas, sebuah sistem yang didasarkan pada produksi beras dan hal-hal yang berhubungan dengan ritual. Lebih lagi, pemahaman komunitas akan sistem peringkat ini lebih menyerupai pengertian bangsa barat mengenai askripsi atau suatu cara untuk memperoleh kedudukan melalui keturunan dibandingkan dengan pencapaian individu. Hal ini menunjukkan adanya satu bentuk ketidaksetaraan dalam peradaban “egaliter”.

#Argumentasi

Artikel “Autonomy as Natural Equality: Inequality in ‘Egalitarian’ Societies” oleh Christine Halliwell membahas tentang adanya ketidaksetaraan dalam peradaban egaliter yang sering dijadikan sebagai contoh utama dalam diskusi-diskusi mengenai kesetaraan. Peradaban egaliter sendiri merupakan peradaban di mana semua orang memiliki derajat yang sama dalam artian tidak ada seorang pun yang memiliki kuasa untuk memaksakan atau memengaruhi kehendak seseorang atau dengan kata lain setiap individu memiliki otonomi yang luas. Adanya perlakuan istimewa yang dirasakan seseorang diakibatkan oleh pencapaian orang tersebut selama hidup, bukannya sesuatu yang dimiliki orang tersebut yang berasal dari silsilah keluarganya. Namun, tidak semua peradaban egaliter memiliki bisa dikatakan memiliki kesetaraan. Halliwell berargumen bahwa Suku Gerai, salah satu Komunitas Dayak, merupakan satu contoh peradaban egaliter yang, jika ditinjau lebih jauh lagi, memiliki ketidaksetaraan di dalamnya.

Sebagai pendahuluan, Halliwell memaparkan keterkaitan otonomi dengan adanya kesetaraan sebagai pendekatan dalam membahas konsep kesetaraan. Dia mendefinisikan adanya kesetaraan dapat dilihat dari sejauh mana seseorang bisa melakukan kehendaknya tanpa adanya paksaan atau pengaruh dari orang lain dengan kata lain seberapa jauh otonomi setiap individu dalam suatu peradaban. Untuk menjelaskan definisi ini Halliwell merujuk pada karya-karya ilmiah pendahulu yang sudah membahas konsep otonomi dan kesetaraan di dalamnya.

Selanjutnya, Halliwell menggambarkan kondisi kehidupan Suku Gerai yang memiliki tingkat kesetaraan yang cukup tinggi di berbagai bidang sekaligus membuktikan kalau Suku Gerai, memang bisa, digolongkan sebagai suatu peradaban egaliter. Halliwell berpendapat bahwa setiap anggota Suku Gerai memiliki kesetaraan dalam kondisi dan kesempatan yang terlihat dari fakta bahwa semua orang memiliki hak dan otonomi yang sama dalam suku tersebut. Suku Gerai terbagi menjadi kelompok-kelompok padi yang masing-masing memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri dalam segala segi kehidupan dan mengambil keputusan yang menyangkut seluruh anggota tiap kelompok masing-

masing. Tidak ada individu atau grup mana pun yang memiliki kekuasaan untuk memaksakan atau menghalangi kehendak individu atau grup lainnya.

Meskipun demikian, suku gerai bukanlah suku yang anarkis di mana tidak ada pemimpin yang bertanggung jawab atas komunitas Suku Gerai secara keseluruhan. Pemerintahan Indonesia mengharuskan suku ini untuk menunjuk seorang kepala desa dan seorang pemimpin adat yang bertanggung jawab atas komunitas kepada institusi negara. Namun, posisi sebagai seorang pemimpin tidak dipandang sebagai suatu posisi yang prestigius di kalangan suku ini. Tidak peduli posisinya, setiap anggota masih memiliki otoritas dan suara yang setara dalam memutuskan masa depan suku dalam musyawarah adat yang diadakan.

Kemudian, Halliwell menjelaskan tentang adanya ketidaksetaraan dalam suku ini yang terlihat dari suatu sistem peringkat yang didasarkan pada produksi beras dan hal-hal terkait ritual adat dari masing-masing grup. Dia berpendapat bahwa produksi beras bisa dikaitkan dengan faktor keturunan di mana seorang anggota bisa mewarisi lahan padi keluarganya yang mana tiap keluarga memiliki lahan dengan luasan yang berbeda. Dalam kasus ritual adat, tidak semua kelompok bisa melakukan ritual sendiri akibat dari kebutuhan ritual yang tidak semua kelompok dapat memenuhinya. Sebagian kelompok terpaksa menumpang pada kelompok lain yang lebih mapan. Dua hal ini memunculkan adanya kesenjangan sosial antar kelompok yang berpengaruh pada bagaimana mereka dilihat oleh kelompok atau individu lain dalam suku ini.

Di akhir artikel, Halliwell menyimpulkan, berdasarkan argumen dan bukti yang sudah dipaparkan, bahwa, meskipun dapat digolongkan sebagai peradaban egaliter, Suku Gerai merupakan komunitas di mana otonomi atau independensi tiap anggota atau kelompok tidak dapat dikaitkan dengan adanya kesetaraan derajat tiap anggota atau kelompok melainkan dari adanya ketidaksetaraan yang diwariskan dari kelompok terdahulu.

#Evaluasi

Menurut saya, argumen-argumen yang dipaparkan relevan dengan apa yang ingin dibuktikan oleh penulis. Namun, saya merasa bahwa penyajian argumen-argumen masih kurang koheren terlihat dari bagaimana penulis mengungkapkan bahwa Suku Gerai merupakan suatu suku dengan tingkat kesetaraan yang tinggi antar individunya di awal artikel, yang dibuktikan dengan penjelasan logis mengapa individu Suku Gerai tergolong setara satu sama lain dari berbagai bidang dan sudut pandang yang kemudian dibantah sendiri oleh penulis di paragraf-paragraf selanjutnya dengan membuktikan bahwa adanya ketidaksetaraan dalam status setiap kelompok. Batasan dalam argumen penulis tiba-tiba berubah dari membahas kesetaraan tiap individu menjadi ketidaksetaraan antar kelompok yang mana menurut kami adalah hal yang tidak masuk akal. Jika suatu kelompok, yang terbentuk oleh individu-individu, saja sudah tidak setara satu sama lain, bagaimana bisa individu di dalamnya setara dengan individu dari kelompok lain.

Judul:

Equality of what?

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1SWmeCEOvvrDVIHgpN_7ROImE8TxrRFGa?usp=sharingLinks to an external site.

Penulis: Amartya Sen

#Tesis

Artikel tersebut membahas tentang berbagai konsep kesetaraan dan tantangan dalam menentukan apa yang sebenarnya harus dianggap sebagai kesetaraan. Sen berpendapat bahwa tidak ada konsep kesetaraan yang universal dan objektif, melainkan harus dipahami dalam konteks nilai dan tujuan yang berbeda-beda. Sen juga menyarankan agar kesetaraan didefinisikan secara lebih luas, termasuk kesetaraan dalam hal kebebasan, kesejahteraan, dan kesempatan hidup yang sama. Oleh karena itu, menentukan kesetaraan memerlukan pemahaman yang lebih luas tentang kebutuhan masyarakat dan mempertimbangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai.

#Argumentasi

Artikel "Equality of What?" oleh Amartya Sen, yang diterbitkan pada tahun 1979, membahas tentang konsep kesetaraan yang seringkali menjadi topik yang kompleks dan kontroversial. Dalam artikel tersebut, Sen mengajukan argumen bahwa tidak ada konsep kesetaraan yang universal dan objektif, melainkan harus dipahami dalam konteks nilai dan tujuan yang berbeda-beda. Konsep kesetaraan dapat diartikan dengan berbagai cara, seperti kesetaraan dalam distribusi sumber daya, kesetaraan dalam kesempatan, atau kesetaraan dalam pengakuan sosial. Namun, menentukan konsep kesetaraan yang tepat memerlukan pemahaman yang lebih luas tentang kebutuhan masyarakat dan mempertimbangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai.

Sen menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih luas tentang kesetaraan dapat membantu menghindari kesalahan dalam menerapkan konsep kesetaraan secara universal, terutama dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda-beda. Selain itu, Sen juga menekankan pentingnya mempertimbangkan banyak faktor dalam menentukan konsep kesetaraan, seperti pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan aspek-aspek sosial lainnya.

Secara keseluruhan, argumen yang disajikan oleh Sen dalam artikel "Equality of What?" memberikan wawasan yang berguna tentang kompleksitas masalah kesetaraan dan betapa pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan kultural dalam menentukan konsep kesetaraan yang tepat. Artikel ini mengingatkan kita bahwa kesetaraan harus dipertimbangkan dengan konteks yang berbeda-beda, dan tidak ada satu jawaban tunggal yang tepat dalam menentukan kesetaraan.

Secara kritis mengulas konsep kesetaraan dan memberikan kritik terhadap definisi sempit kesetaraan yang sering diterapkan dalam bidang ekonomi. Sen menekankan bahwa kesetaraan harus dipahami secara lebih luas, tidak hanya sebatas distribusi pendapatan dan kekayaan, tetapi juga dalam hal kebebasan, kesejahteraan, dan kesempatan hidup yang sama.

Sen mengkritik penggunaan indikator seperti Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai ukuran kesetaraan, yang sering digunakan dalam pengukuran kesetaraan ekonomi, karena hanya mencerminkan satu aspek kesetaraan. Padahal, faktor-faktor lain seperti pendidikan dan kesehatan juga harus dipertimbangkan dalam pengukuran kesetaraan. Sen menyatakan bahwa pendekatan konvensional dalam pengukuran kesetaraan tidak memperhitungkan perbedaan awal yang dimiliki oleh individu dalam hal kesetaraan, dan oleh karena itu, faktor-faktor seperti kesempatan hidup yang sama dan kebebasan harus dipertimbangkan dalam penilaian kesetaraan.

Dalam artikel ini, Sen memberikan beberapa argumen terkait konsep kesetaraan, termasuk kritik terhadap pendekatan konvensional dalam pengukuran kesetaraan. Sen menyerukan agar pengukuran kesetaraan harus lebih holistik dan mencakup banyak aspek kesetaraan, bukan hanya aspek ekonomi semata. Konsep kesetaraan yang lebih luas ini akan membantu kita memahami kesetaraan secara lebih baik dan merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mencapainya.

Dalam konteks global saat ini, di mana kesenjangan sosial dan ekonomi semakin melebar, artikel "Equality of What?" oleh Amartya Sen masih relevan dan penting untuk dipelajari dan dipahami. Konsep kesetaraan yang lebih luas dan holistik yang disajikan oleh Sen dapat menjadi landasan bagi upaya kita dalam mencapai kesetaraan yang sebenarnya di dunia yang semakin kompleks ini.

#Evaluasi

Berikut adalah beberapa poin evaluasi mengenai artikel "Equality of What?" oleh Amartya Sen:

1. Poin Positif

Artikel "Equality of What?" karya Amartya Sen memiliki beberapa kelebihan yang penting untuk dipelajari dan dipahami

- Artikel ini memberikan wawasan yang sangat berguna tentang kompleksitas masalah kesetaraan dan mengingatkan kita bahwa tidak ada satu jawaban tunggal yang tepat dalam menentukan kesetaraan.
- Sen menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan kultural dalam menentukan konsep kesetaraan yang tepat, dan ini sangat penting karena konsep kesetaraan dapat diartikan dengan berbagai cara.

- Sen memberikan contoh konkret tentang bagaimana pengertian kesetaraan dalam konteks kultural yang berbeda-beda dapat berbeda.
- Artikel ini menawarkan pandangan kritis tentang konsep kesetaraan yang sering diabaikan oleh banyak ekonom
- Sen menekankan bahwa kesetaraan harus dipahami secara luas, tidak hanya terkait distribusi pendapatan dan kekayaan, tetapi juga kebebasan, kesejahteraan, dan kesempatan hidup yang sama. Pendekatan yang lebih luas ini dapat membantu kita memahami kesetaraan secara lebih baik dan merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mencapainya.
- Artikel ini menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor lain selain ekonomi dalam pengukuran kesetaraan, seperti kebebasan, kesejahteraan, dan kesempatan hidup yang sama
- Sen mengkritik penggunaan indikator tunggal seperti Produk Domestik Bruto (PDB) dalam pengukuran kesetaraan karena hanya mencerminkan satu aspek kesetaraan. Faktor-faktor lain seperti pendidikan dan kesehatan juga harus dipertimbangkan dalam pengukuran kesetaraan
- Artikel ini mengkritik pendekatan konvensional dalam pengukuran kesetaraan yang tidak memperhitungkan perbedaan awal yang dimiliki oleh individu dalam hal kesetaraan. Oleh karena itu, Sen menyarankan agar faktor-faktor seperti kesempatan hidup yang sama dan kebebasan harus dipertimbangkan dalam penilaian kesetaraan
- Artikel ini memberikan pandangan yang lebih holistik tentang kesetaraan yang dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mencapai kesetaraan.
- Sen menyarankan agar pengukuran kesetaraan mencakup banyak aspek kesetaraan, bukan hanya aspek ekonomi semata.

2. Poin Negatif

Seperti kebanyakan artikel, "Equality of What?" juga memiliki beberapa kekurangan

- Artikel ini tidak memberikan solusi konkret untuk menyelesaikan masalah kesetaraan, dan lebih berfokus pada memahami kompleksitas masalah kesetaraan daripada memberikan solusi konkret untuk menyelesaikan masalah tersebut.
- Artikel ini hanya membahas pandangan Sen tentang kesetaraan tanpa mempertimbangkan pandangan lain. Oleh karena itu, artikel ini kurang obyektif dan tidak memberikan sudut pandang yang beragam.
- Artikel ini tidak memberikan contoh konkret tentang bagaimana kesetaraan dapat didefinisikan secara lebih luas dalam konteks yang lebih luas, sehingga pembaca mungkin kesulitan memahami aplikasi praktis dari pandangan Sen tentang kesetaraan.

- Terkadang, argumen yang disajikan terlalu kompleks dan mungkin sulit dipahami oleh pembaca awam.
- Beberapa konsep yang dibahas dalam artikel ini memerlukan latar belakang pengetahuan yang luas, dan mungkin sulit dipahami oleh orang yang tidak terbiasa dengan konsep akademis.

Anggota Kelompok:

1. Helfira Lady Ari Pramesti
2. Rosyida Ishma Mardhiyyah
3. Dian Indah Pratiwi
4. Christ Jordan Baeha
5. Sekar Kinasih
6. Syafarizal Irgi Margiansyah
7. Nur Laily Fauziyah
8. Zulfa Nabilah Nurvitasari
9. Atur Muhammad Simamora
10. Nur Indah Setyaningsih
11. Muhammad Zainil Mubarak
12. Dwi Rangga Rhaditya Siwi Widodo